

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kepentingan nasional menjadi salah satu pemicu utama terjadinya invasi Rusia terhadap Ukraina yang melatarbelakangi implementasi kebijakan politik luar negeri Rusia terhadap Ukraina yang dirancang untuk melindungi maupun mencapai kepentingan nasional Rusia, keamanan, maupun tujuan politik ideologi. Dalam hal ini posisi Ukraina yang lebih dekat dengan Amerika Serikat maupun Eropa dianggap sebagai sebuah bentuk ancaman terhadap kedaulatan maupun kepentingan Rusia di kawasan tersebut. Oleh karenanya berangkat dari isu Iridentisme, Rusia berusaha untuk mengimplementasikan kebijakan luar negerinya melalui aneksasi serta penggabungan Krimea dan Invasi ke wilayah Donbass yang termasuk kedalam wilayah teritori Ukraina, guna melindungi kepentingan nasional Rusia itu sendiri. Terlepas dari adanya kesamaan ras, etnis, maupun sejarah, Rusia dinilai telah menodai kesepakatan kedaulatan dalam hukum internasional maupun keamanan internasional (Salushev, 2014).

Tindakan berani yang ditunjukkan Rusia tersebut dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Rusia yang diadaptasi dari kebijakan luar negeri yang diterapkan Uni Soviet. Rusia mempunyai fokus pandang dalam melihat dan memetakan arah kebijakan politik, yang pertama adalah bahwa Rusia merupakan sebuah entitas *Great Power* yang didasari pada kejayaan masa lalu Rusia sejak zaman Kekaisaran Rusia hingga zaman Perang Dingin. Akibat rasa superioritas tersebutlah Rusia dibawah pemerintahan Presiden Vladimir Putin melalui kebijakan *Great Power*nya, mereka mampu melakukan apapun tanpa takut terhadap negara manapun. Kedua, Rusia menganggap bahwa luasnya wilayah sebuah negara menjadi salah satu komponen penting dalam implementasi kebijakan politik luar negeri, Rusia mengisyaratkan bahwa aspek geopolitik menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina. Sebagai sebuah entitas besar, Rusia selalu berdiri sebagai negara penengah yang menyeimbangkan situasi, melalui konsep *equilibrium distribution of power with counter balancing*, Rusia percaya jika sistem internasional tidak bisa dikelola oleh hanya satu aktor tapi butuh aktor lainnya untuk terjadinya *balance of power*, oleh karenanya ketika dihadapkan dengan permasalahan ini Rusia menganggap hadirnya Amerika Serikat di Ukraina akan mengancam keseimbangan kekuatan di kawasan Eropa Timur yang tentunya akan mengancam kepentingan Rusia terutama dalam sisi geopolitik maupun implementasi

kebijakan luar negerinya. Oleh karenanya, meskipun terancam Rusia cenderung akan menghindari peperangan secara terbuka dan memilih untuk melakukannya dengan cara diam-diam. Tetapi meskipun begitu, jika Rusia memilih melakukan perang terbuka maka hal tersebut akan dilakukan di sekitar wilayah Rusia, karena sebagai sebuah negara yang besar Rusia amat sangat mempertimbangkan aspek geopolitiknya sehingga akan melakukan cara apapun demi melindungi kepentingannya meskipun tidak sejalan dengan sisi pandang Rusia yang menghindari peperangan secara terbuka (Wicaksana, 2015).

Banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan Rusia dalam menginvasi Ukraina, namun diluar itu, dukungan Rusia terhadap gerakan separatisme di Donetsk dan Luhansk, Pencaplokan Semenanjung Krimea, rencana bergabungnya Ukraina dengan NATO memperparah konflik berdarah diantara kedua negara tersebut, yang pada akhirnya berimplikasi pada upaya invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina (Sudiq & Yustitiantingtyas, 2022). 24 Februari 2022, menjadi tanggal bersejarah ketika Rusia mulai menginvasi Ukraina sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan dan hegemoni politiknya di kawasan Eropa barat dari ancaman Ukraina yang telah didukung oleh kekuatan barat dan NATO. Rusia berusaha untuk mengatasi kedekatan antara Ukraina dan Amerika maupun negara Eropa Barat karena dianggap mengancam kedaulatan Rusia. Rusia juga dalam invasinya menginginkan mempertahankan pola hubungan dekat dengan negara bekas pecahan Uni Soviet. Sejak tahun 1955 Rusia yang pada saat itu masih berbentuk Uni Soviet mendominasi hegemoni kekuatan politik di Eropa Timur yang kemudian direspon dengan mendirikan Pakta Warsawa untuk menandingi hegemoni kekuatan NATO di Eropa Barat. Seiring berjalannya waktu Pakta Warsawa yang didirikan sebagai dasar respon ancaman yang dilakukan NATO perlahan kemudian melemah akibat krisis yang dialami Uni Soviet dan negara-negara satelitnya di tahun 1990. Berkat kegagalan Pakta Warsawa tersebut, NATO yang merasa memenangkan “perang pengaruh” dengan Pakta Warsawa akhirnya melebarkan sayapnya dengan memasukan negara-negara yang dahulunya pernah menjadi anggota Pakta Warsawa kedalam keanggotaan NATO. Negara-negara seperti Polandia, Rumania, Bulgaria, Hungaria kemudian bergabung dengan NATO pada tahun 1999 pasca keruntuhan Uni Soviet. Oleh karenanya, ekspansi NATO yang semakin lama semakin mendekati wilayah kedaulatan Rusia dianggap sebagai sebuah ancaman geopolitik. Sudah lama Rusia memang menolak bergabungnya Ukraina kedalam NATO, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares, mengatakan bahwa, Rusia pada dasarnya memiliki kekhawatiran apabila Ukraina bergabung dengan NATO maka NATO akan lebih mudah

membawa persenjataan ke perbatasan Ukraina yang langsung berbatasan dengan Rusia, yang karenanya hal tersebut direspon oleh Rusia sebagai sebuah ancaman kedaulatan (Rosa, 2022).

Gambar 3.1 Perluasan Keanggotaan NATO, Bukti Kedaulatan Rusia Terancam.



Sumber: (CNN, 2022)

Meskipun begitu, jika melihat secara geografisnya, kondisi geopolitik Rusia sudah mulai tersudutkan dengan upaya bergabungnya Finlandia maupun Swedia sebagai bagian dari NATO. Tidak hanya itu Estonia, Latvia, Lithuania yang dulunya menjadi anggota Pakta Warsawa kini juga sudah merapat menjadi anggota NATO. Sehingga daripada hal tersebut, jika Ukraina jatuh dan masuk kedalam keanggotaan NATO maka wilayah Rusia akan berbatasan langsung dengan negara persekutuan NATO dan dikhawatirkan Ukraina akan menjadi titik strategis upaya perebutan pengaruh politik bahkan wilayah Rusia kedepannya oleh NATO (Kemp, 2022). Faktor pencaplokkan Semenanjung Krimea di tahun 2014 juga menjadi salah satu upaya Rusia mengejar kebijakan luar negerinya dalam sektor ekonomi, isu irendentisme, maupun hegemoni politiknya di kawasan tersebut (Triyana, 2015). Secara garis besar, Krimea secara pengaruh lebih dekat terhadap Rusia dibandingkan dengan Ukraina. Keduanya juga memiliki hubungan kuat dalam hal politik, sosial militer, ekonomi, hingga identitas kebangsaan masyarakat Krimea. Dalam hal sosial politik, Sebagian besar masyarakat Krimea dipengaruhi gagasan *Kremlin oriented* yang menginginkan fokus kebijakan luar negeri

Ukraina lebih ditekankan kepada Rusia dibandingkan Amerika Serikat maupun Eropa. Dalam aspek militer, Krimea menjadi daerah strategis penempatan Armada Laut Hitam milik Rusia yang didasari oleh perjanjian Traktat Persahabatan tahun 1997, dimana Pelabuhan Sevastopol menjadi tempat pangkalan utama Armada Laut Hitam Rusia di Semenjung Krimea (Oktaviano & Fachri, 2015). Dalam sisi ekonomi, Rusia juga terlibat dengan Ukraina melalui penyediaan dan pengurangan harga gas kepada Ukraina sebesar US\$ 100 per ton. Rusia juga menjadikan Ukraina sebagai jalur pipa gas untuk mengalirkan energi gas bumi kepada negara-negara di Eropa, dengan memasok hampir 45% kebutuhan gas alam cair Eropa. Sehingga dari aspek-aspek tersebutlah yang mempengaruhi kuatnya hubungan kedua entitas tersebut (Rahman, 2016).

Isu separatisme di Donetsk dan Luhansk juga turut menjadi alasan Rusia menginvasi Ukraina. Donetsk dan Luhansk menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Rusia, dan menjadi wilayah yang kental akan akulturasi budaya Rusia dan mayoritas penduduknya berbicara Rusia. Rusia yang menganggap wilayah tersebut perlu diselamatkan secara “nasionalismenya” dari pengaruh Ukraina. Tindakan tersebut kemudian direspon Luhansk dan Donetsk dengan adanya pembentukan referendum lokal pada tahun 2015 yang dianggap ilegal oleh pemerintah Ukraina, meski begitu Rusia mendukung adanya referendum tersebut. Dalam pandangan aspek geopolitik, upaya dukungan yang diberikan Rusia terhadap pemisahan kedua wilayah tersebut merupakan upaya Rusia menekan Ukraina agar tidak bergabung dengan NATO (Utami, 2022).

Dalam aspek ekonomi, wilayah Luhansk dan Donetsk dinilai menjadi daerah strategis yang menjadi proyek besar Rusia, yaitu proyek pipa Nord Stream 2. Pipa tersebut merupakan pipa yang dibangun untuk mengantarkan gas alam cair antara Rusia dan Jerman. Proyek besar tersebut diperkirakan mampu menghilangkan biaya cukai transit dari alur pengantaran gas. Tidak hanya itu, daerah Donetsk dan Luhansk juga menyimpan potensi sumber daya alam terak yang merupakan campuran oksida logam, serta potensi alam lainnya seperti fosfat, sulfit, dan karbida. Donetsk juga merupakan salah satu penghasil baja utama dan memiliki pertambangan, sedangkan Luhansk merupakan daerah yang menjadi lokasi cadangan sumber daya batu bara (Iswara, 2022). Hal tersebut lah yang menjadikan Ukraina khawatir dengan eksistensi Rusia di wilayah tersebut dan bahkan direspon tidak hanya sebagai sebuah ancaman kedaulatan, namun juga “senjata politik mematikan”. Oleh karenanya dengan mengakui kemerdekaan kedua wilayah tersebut maka Rusia mampu membuat ketidakstabilan politik di Ukraina yang akan mempermudah Rusia untuk menguasai Luhansk dan Donetsk (CNN, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, pengimplementasian kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dalam tempo ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk lebih mengkaji hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan luar negeri Rusia terhadap Ukraina yang berangkat dari permasalahan geopolitik, ekonomi, isu iredentisme, maupun ancaman kedaulatan. Ada beberapa alasan untuk mendalami permasalahan ini pertama, mengacu pada realitas politik, kedekatan Ukraina dengan Amerika dan NATO dan invasi yang didasari oleh kebijakan luar negeri menjadi alasan utama untuk mencapai kepentingan nasional Rusia terhadap negara yang diinvasi. Kedua, Krimea, Luhansk, dan Donetsk yang memiliki kedekatan secara kultural maupun politik dianggap mempunyai posisi penting dalam pengimplementasian kebijakan luar negeri Rusia guna melindungi kepentingan maupun posisi Rusia di kawasan tersebut.

1. Rumusan Masalah

Faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia dalam menginvasi Ukraina?

2. Landasan Teori

2.1 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional menjadi konsep utama dalam membahas manuver politik maupun yang mendasari tindakan yang dilakukan Rusia kepada Ukraina saat ini. Kepentingan nasional juga menjadi dasar kebijakan luar negeri setiap negara karena disusun dan dirumuskan dari kepentingan nasional yang ingin dituju dari sebuah negara. Kepentingan nasional berdiri sebagai sesuatu yang menjadi tolak ukur bagaimana negara tersebut bertindak.

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, “Kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan-keinginan oleh suatu negara yang berdaulat dalam berhubungan dalam negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya” (Plano & Olton, 1999). Lebih jauh Jack C. Plano dan Roy Oltun juga mengemukakan bahwa: “Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kerjasama ekonomi” (Plano & Olton, 1999). Kepentingan nasional menjadi poin utama bahwa masing-masing negara harus mengejar kepentingannya terlepas dari peraturan internasional yang mengikat, persetujuan, konvensi, aturan, hukum internasional ataupun hal yang mengikat

karena negara menganggap kesepakatan internasional perlu dikesampingkan terlebih dahulu bilaman bertentangan dengan kepentingan negara.

Hans Morgenthau juga mengemukakan bahwa tujuan adanya kepentingan nasional sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup, perlindungan fisik, politik, serta identitas budaya dari gangguan negara bangsa lainnya. Kepentingan nasional juga berhubungan dengan tujuan maupun cita-cita yang diinginkan sebuah negara (Morgenthau, 1960). Hans Morgenthau mengelompokan kepentingan dasar yang memotivasi negara dalam mengimplementasikan kepentingan nasional negaranya yaitu, aspek kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi, maupun pengaruh politik sebuah negara di dunia. Dalam hal ini unsur keamanan menjadi upaya utama Rusia dalam menegakan kepentingan nasionalnya, Rusia mengimplementasikannya dengan melakukan kebijakan intervensi terhadap Ukraina sebagai upaya menyelamatkan dan memberikan penegasan bahwa kepentingan keamanan Rusia adalah faktor yang paling utama dalam upaya pengimplementasian kepentingan nasionalnya. Morgenthau mengemukakan bahwa kepentingan unsur keamanan dan pertahanan merupakan upaya untuk melindungi negara, bangsa, warga, dari ancaman fisik maupun ancaman territorial (Morgenthau, 1960).

Kepentingan nasional pada dasarnya mencakup bagaimana unsur keamanan negara dapat dipertahankan, kelangsungan hidup warga negaranya, kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan warga negara, serta kedaulatan wilayah negara. Keamanan (security) maupun kesejahteraan (properity) menjadi dua unsur pokok penting dalam memandang arah pertimbangan kebijakan nasional (Ornay & Azizah, 2022). Dalam hal ini Rusia ingin melindungi kepentingan dalam aspek geopolitiknya dari ancaman NATO, maupun membangun kesejahteraan dengan menguasai daerah-daerah di Ukraina yang kaya akan sumber daya alam maupun potensi industri besar terutama di daerah Krimea, Luhansk, dan Donbass (Iswara, 2022).

2.2 Model Pengambilan Keputusan Luar Negeri

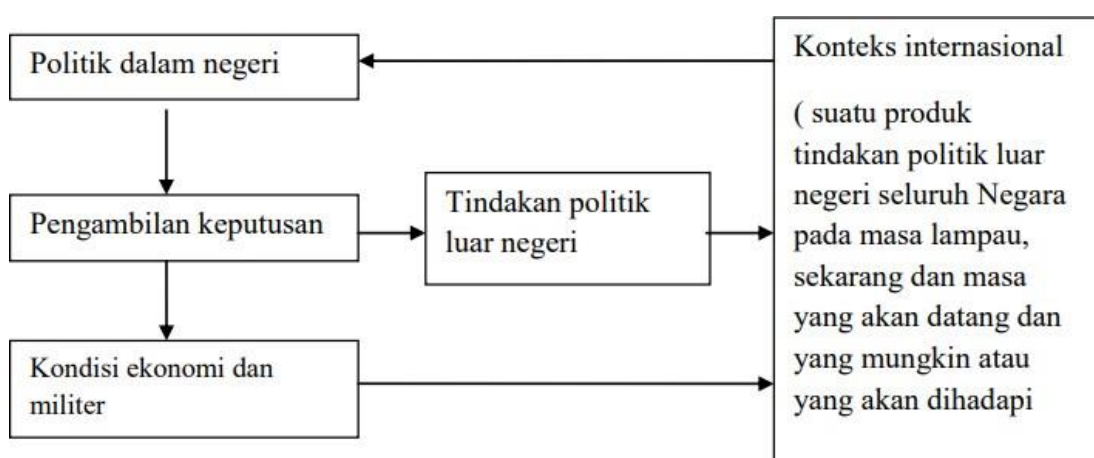
Model kebijakan luar negeri menjadi salah satu pembahasan penting dalam dinamika dunia hubungan internasional. Berbagai fenomena yang terjadi dalam pola hubungan antar negara di dunia bisa dijelaskan melalui kebijakan luar negeri suatu yang berorientasi pada kepentingan nasional negara tersebut. William D. Coplin berpendapat bahwasanya kebijakan luar negeri dari sebuah negara dapat dipertimbangkan dan dihasilkan dari tiga faktor yang berpengaruh signifikan dalam berdirinya suatu negara, yaitu, konteks internasional, politik

domestik, serta kemampuan ekonomi dan militer. Model Kebijakan luar negeri bisa juga dikatakan sebagai sebuah langkah strategis dalam memperoleh kepentingan nasional, meskipun diperlukan adanya pertimbangan maupun pengkajian dalam merumuskan kebijakan luar negeri tersebut. Konteks internasional menjadi pertimbangan utama karena melibatkan kondisi geopolitik, ekonomi, dan politik suatu negara (Lisbet, 2009). Politik domestik juga berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri karena mempengaruhi pola tindakan dari pengambil keputusan yang berorientasi pada situasi politik dalam negeri guna mencapai kepentingan nasional. Kondisi dan kemampuan ekonomi maupun militer menjadi pertimbangan yang mampu mempengaruhi pola maupun kemampuan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negerinya, karena kemampuan ekonomi dan militer yang kuat mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dan negara cenderung akan lebih berani dalam melancarkan kebijakan luar negerinya, hal tersebut selaras, semakin besar ekonominya maka alokasi dana untuk militer akan semakin besar, sedangkan semakin kuat militer maka akan mampu menjamin kestabilan keamanan suatu negara yang kemudian mendorong terjadinya kestabilan perekonomian yang kondusif (Coplin, 1992).

William D. Coplin dalam modelnya juga mengemukakan bahwa lebih daripada itu Konteks internasional, geopolitik, ekonomi, maupun politik menjadi elemen pertimbangan yang sangat signifikan dalam implementasi kebijakan luar negeri suatu negara, lebih daripada itu mampu berpengaruh dalam membahas dampak internasional terhadap pengambilan keputusan luar negeri suatu negara. Dalam model pengambilan keputusan terdapat 3 jenis pengambilan keputusan luar negeri: pertama, keputusan luar negeri yang bersifat umum, yang bisa dinilai berdasarkan pernyataan kebijakannya yang lebih mencakup pada perencanaan yang bersifat *contingency* maupun tindakan langsung oleh sebuah negara. Kedua, Keputusan luar negeri administratif, jenis keputusan ini merupakan keputusan yang dibuat langsung oleh birokrat pemerintahan yang melakukan hubungan luar negeri maupun hubungan internasional, yang dalam hal ini kementerian luar negeri bertanggungjawab langsung atas jenis keputusan ini. Keputusan jenis ini juga menyangkut terkait kondisi yang dibatasi lingkup, waktu, dan ruang. Ketiga, keputusan luar negeri kritis, keputusan ini merupakan hasil asimilasi dari kedua jenis keputusan sebelumnya yang berdampak masif bagi kebijakan umum negara terkait. Jenis keputusan ini biasanya berimplikasi pada politik luar negeri.

Jenis keputusan ini biasanya ditentukan dalam waktu yang singkat serta menimbulkan konsekuensi tertentu bagi negara tersebut. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa dengan melihat implikasi pengambilan keputusan luar negeri yang Rusia lakukan terhadap Ukraina maka keputusan Rusia untuk menginvasi Ukraina merupakan keputusan luar negeri yang bisa digolongkan kepada jenis pengambilan keputusan yang kritis. William D. Coplin mengemukakan pola pengambilan keputusan luar negeri, dan untuk memudahkan memahami teori ini, William D. Coplin membuat diagram gambar sebagai berikut:

Gambar 1.4 Diagram model pengambilan kebijakan politik luar negeri.



Sumber: William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional: suatu telaah teoritis, CV, sinar baru, Bandung 1992, hal. 30.

Melalui diagram tersebut, adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebuah negara berimplikasi pada kepentingan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, maupun konteks kepentingan internasional negara tersebut untuk merumuskan pengambilan keputusan politik luar negerinya.

Graham Allison seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat, mengemukakan pendekatan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri yaitu Model Aktor Rasional (Rational Actor Model), Model Proses Organisasi (The Bounded Rationality Model), dan Model Politik Birokratik. Model-model tersebut digunakan untuk bisa membaca pola para pembuat kebijakan luar negeri untuk memutuskan kebijakan apa yang akan dikeluarkan. Namun dalam studi kasus yang terjadi dalam invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina ini menggunakan model *Rational Actor* yang menganggap jika negara dalam hal ini sebagai aktor rasional utama yang mengedepankan keamanan nasional dan kepentingan nasional dalam membuat ataupun merumuskan kebijakan luar negeri ataupun sebagai prinsip utama

pembuatan kebijakan luar negerinya. Contoh penggunaan model aktor rasional bisa kita lihat ketika isu perluasan yang dilakukan NATO terhadap Ukraina menjadi prioritas kebijakan luar negeri Rusia untuk menahan laju pengaruh NATO di kawasan Eropa timur, faktor terancamnya pengaruh Rusia dikawasan tersebut dinilai mampu mengancam kedaulatan, keamanan, pengaruh politik Rusia, maupun kepentingan ekonomi kawasan. Dalam hal kedaulatan, Rusia takut apabila Ukraina bergabung dengan NATO maka Rusia tidak bisa menggunakan pangkalan laut di Sevastopol untuk pasukan angkatan laut, armada laut hitam. Dalam hal keamanan Rusia juga mencemaskan jika Ukraina bergabung dengan NATO maka dengan mudah NATO akan membangun pangkalan militer yang dinilai mengancam keamanan nasional Rusia, Rusia takut jika NATO membangun pangkalan militer untuk digunakan menyerang Rusia karena jaraknya yang begitu dekat dengan Rusia. Dalam hal politik, Rusia akan kehilangan kekuatan pengaruhnya sehingga akan kesulitan untuk membangun integrasi ataupun upaya menundukan negara-negara yang dianggapnya lebih lemah. Untuk itu Rusia berupaya mempertahankan kepentingannya tersebut dengan melakukan invasi sebagai upaya menjaga agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO, kebijakan invasi ini juga merupakan hasil perhitungan yang tentu saja mengedepankan keuntungan maupun menjaga kestabilan dan keamanan nasional Rusia itu sendiri, sehingga untuk mendukung kebijakan tersebut, Putin memerintahkan pasukan militer Rusia untuk melakukan “Operasi Militer Khusus” ke Ukraina, menghentikan pasokan gas alam dan minyak bumi ke Eropa Barat, maupun mencaplok daerah-daerah perbatasan Ukraina dengan dalih perlindungan etnis Rusia yang tinggal di wilayah Ukraina khususnya di Crimea dan di Donbass (mudabicara, 2021).

3. Hipotesis

Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina merupakan implikasi dari kepentingan nasional Rusia dalam faktor geopolitik yang ingin melawan pengaruh perluasan NATO di Eropa Timur serta terancamnya keamanan nasional Rusia akibat upaya bergabungnya Ukraina kedalam keanggotaan NATO, faktor ekonomi yang ingin membangun integrasi ekonomi kawasan serta menguasai jalur-jalur pipa yang mengalirkan gas bumi ke Eropa Barat, serta faktor militer yang ingin menguasai pelabuhan Angkatan Laut di Sevastopol untuk menempatkan Armada Laut Hitam Rusia di kawasan Crimea.

4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dibalik invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina di tahun 2022.

5. Metodologi Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian secara kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis peristiwa, fenomena, dinamika sosial masyarakat, persepsi publik seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Mengacu pada metode pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang didapatkan melalui sumber-sumber data seperti buku, jurnal, serta artikel. Setelah semua data terkumpul, hasil akhir akan didapatkan dengan mencari poin utama dari sebuah penelitian sehingga akan mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi fokus pembahasan agar tujuan dalam kepenulisan skripsi ini bisa tercapai dan sesuai dengan judul yang telah dipaparkan, dalam hal ini jangkauan penelitian mencakup alasan kenapa Rusia menginvasi Ukraina di tahun 2022, serta hal apa saja yang mempengaruhi dan mendasari tindakan Rusia dalam melakukan invasi terhadap Ukraina.

Penelitian ini juga melakukan kajian literatur review terhadap beberapa sumber jurnal yang memiliki pembahasan yang sama namun ada beberapa perbedaan terkhusus pada topik utama pembahasan yang lebih berfokus pada faktor ekonomi antara Rusia dan Ukraina, ataupun terfokus dalam membahas kronologi peperangan dan jalannya invasi.

Sulastri, A. (2013). Politik Energi Rusia dan Dampaknya terhadap Eropa terkait Sengketa Gas Rusia Ukraina 2006-2009. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. 2, journal.unair.ac.id*, 1-25.

(Atok, 2022) Atok, F. (2022). Analisis Konflik Rusia dan Ukraina (Studi Kepustakaan Status Kepemilikan Krimea). *Jurnal Poros Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor*, 11-15.

7. Sistematika Keperulisan

Penulisan dari sebuah penelitian bisa dipaparkan dengan menggunakan susunan yang tersistematis. Sistematika penulisan yang bisa digunakan dalam sebuah penelitian dalam skripsi yaitu:

BAB 1 : Pada bab 1 berisi tentang pendahuluan serta penyajian uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Metodologi, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB 2 : Pada bab 2 berisi tentang pembahasan sejarah awal mula hubungan dan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina serta hal apa saja yang mempengaruhi Rusia dalam menginvasi Ukraina.

BAB 3 : Pada bab 3 menjelaskan tentang upaya dan hasil apa yang ingin dicapai Rusia ketika menginvasi Ukraina.

BAB 4 : Pada bab 4 berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.